

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
PRAKATA	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Masyarakat Tionghoa di Indonesia.....	12
2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Sejak Pemerintahan Soekarno Sampai Pemerintahan Soeharto	15
2.2.1 Kebijakan Soekarno.....	16
2.2.2 Kebijakan Soeharto.....	19
2.3 Kerusuhan Sosial 1998.....	28

Hena Gian Hermana, 2015

Kerusuhan anti etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 (sebuah Tinjauan Historis)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.4	Teori Prasangka Sosial	33
2.5	Teori Konflik	34
2.6	Penelitian Terdahulu	37
2.6.1	Skripsi	37
2.6.2	Jurnal.....	39
2.6.3	Buku.....	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Metode Penelitian	43
3.2	Persiapan Penelitian.....	45
3.2.1	Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian	45
3.2.2	Penyusunan Rancangan Penelitian	45
3.2.3	Mengurus Perizinan	46
3.2.4	Menyiapkan Perlengkapan Penelitian.....	47
3.2.5	Proses Bimbingan	47
3.3	Pelaksanaan Penelitian.....	48
3.3.1	Heuristik (Pengumpulan Sumber)	48
3.3.1.1	Sumber Primer	49
3.3.1.2	Sumber Sekunder	52
3.3.2	Kritik Sumber	55
3.3.2.1	Kritik Eksternal	55
3.3.2.2	Kritik Internal.....	58
3.3.3	Interpretasi	59
3.3.4	Historiografi.....	63
BAB IV KERUSUHAN ANTI ETNIS TIONGHOA DI JATIWANGI		
 FEBRUARI 1998		65
4.1.	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Jatiwangi.....	65
4.1.1	Kondisi Lingkungan Fisik	65
4.1.2	Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	67

4.2	Kondisi Masyarakat Jatiwangi Khususnya Etnis Tionghoa Sebelum Terjadinya Kerusuhan.....	69
4.2.1	Kondisi Sosial.....	69
4.2.2	Kondisi Ekonomi.....	71
4.3	Latar Belakang Terjadinya Kerusuhan	74
4.3.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan.....	74
4.4	Kronologis Terjadinya Kerusuhan.....	78
4.4.1	Tanggal 12 Februari 1998.....	78
4.4.2	Tanggal 13 Februari 1998.....	83
4.4.3	Tanggal 14 Februari 1998.....	85
4.4.4	Dampak Terjadinya Kerusuhan	87
4.4.4.1	Bagi Etnis Tionghoa	87
4.4.4.2	Bagi Penduduk Setempat	89
4.5	Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kerusuhan	89
4.5.1	Pemerintah Daerah.....	89
4.5.2	Pemerintah Pusat	93
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1	Simpulan.....	96
5.2	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT PENELITI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kerusuhan-Kerusuhan di Indonesia Periode Mei Sampai Juni Tahun 1998.....	30
Tabel 2.2 Kerusuhan SARA di Indonesia Yang Melibatkan Warga Etnis Tionghoa Per tanggal 13-14 Februari 1998.....	31
Tabel 4.1 Rata-rata Harga Eceran Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Majalengka (Pasar Sindangkasih) Kurun Waktu Tahun 1996-1998. 72-73	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Wilayah Administratif Kecamatan Jatiwangi	66
Gambar 4.2 Peta Kerusuhan di Jatiwangi Hari Kamis, 12 Februari 1998.....	79
Gambar 4.3 Peta Kerusuhan di Jatiwangi Hari Jumat 13 Februari 1998.....	84
Gambar 4.4 Peta Kerusuhan di Jatiwangi Hari Sabtu, 14 Februari 1998.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Frekuensi Bimbingan
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Majalengka
- Lampiran 5 Daftar Narasumber
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Wawancara
- Lampiran 7 Hasil Wawancara
- Lampiran 8 Koran Kompas Edisi 13 Februari 1998
- Lampiran 9 Koran Kompas Edisi 15 Februari 1998
- Lampiran 10 Arsip Upaya Pengendalian dan Pengendalian Krisis Nomor: 40/DPA/1998
- Lampiran 11 Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan,

Hena Gian Hermana, 2015

Kerusuhan anti etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 (sebuah Tinjauan Historis)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia.